



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANOMALI MINYAK GORENG CURAH

Ari Mulianta Ginting
Peneliti Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI, Badan Urusan Logistik (BULOG), ID Food dan Bupati Bogor Ade Yasin sidak ke Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada sidak tersebut, Komisi VI masih menemukan harga minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Kondisi harga minyak goreng curah yang berada diatas HET tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, namun hampir terjadi di seluruh pelosok Indonesia. Harga minyak goreng curah di Pasar Jaya Anyar, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berada di Ibu Kota Negara juga mengalami kelangkaan minyak goreng curah hingga harganya mencapai Rp21.000 per kilogram.

Awalnya, kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit global yang melesat sejak pandemi, fase pemulihan perekonomian dunia, dan dampak perang Rusia-Ukraina. Dalam kerangka Ilmu Ekonomi ketika permintaan melebihi penawaran yang produsen dapat tawarkan maka terjadi kenaikan harga pada suatu produk. Begitu pula yang terjadi pada minyak sawit. Hal ini berdampak terhadap kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.

Teriakan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat sensitif kepada perubahan harga menjadi beban tersendiri akan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng khususnya minyak goreng curah menjadi ironi dan anomali, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negeri penghasil utama minyak sawit dan minyak sawit tersebut merupakan bahan baku utama minyak goreng.

Padahal pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi VI telah menetapkan HET minyak goreng curah dan mengeluarkan kebijakan subsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) untuk memastikan HET dapat dicapai.

Situasi anomali terkait dari persoalan minyak goreng khususnya minyak goreng curah merupakan bentuk buruknya tata Kelola industri sawit. Persoalan muncul ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun ternyata belum memberikan dampak terhadap penurunan harga minyak goreng curah bahkan menambah insentif bagi para pengusaha untuk memperbanyak keuntungan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) tanggal 11 April 2022 rata-rata penyaluran minyak goreng curah bersubsidi sebesar 6.060 ton per hari. Angka tersebut naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 4.050 ton per hari.

Namun, fakta di lapangan harga minyak goreng curah masih atas HET pemerintah. Salah satu kendala yang diungkapkan adalah masalah rantai distribusi minyak goreng dan lambatnya perusahaan minyak goreng sawit yang memproduksi dan menyuplai minyak goreng sawit karena alasan profit.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah di pasar tradisional mencapai Rp19.900 per kilogram. Harga minyak goreng curah yang berada diatas HET yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa persoalan minyak goreng curah masih menjadi permasalahan dan kendala di tengah masyarakat.

Atensi DPR

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan permasalahan utama minyak goreng tersebut berada di rantai distribusi. Gangguan distribusi ini disebabkan oleh banyaknya pemain. Lebih lanjut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga terjadi pelanggaran, seperti penetapan harga kartel, pengaturan produksi dan pemasaran serta pembatasan suplai ke pasar.

Komisi VI DPR RI perlu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalur distribusi dan produksi minyak goreng curah. Hal ini dikarenakan masih ditemui permasalahan terkait distribusi dan produksi dari minyak goreng curah. Komisi IV DPR RI perlu memastikan bahwa distribusi dan produksi minyak goreng curah memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga minyak goreng curah ada di HET yang telah ditetapkan.

Komisi VI DPR RI juga perlu memastikan bahwa tidak ada upaya dari produsen untuk memperlambat produksi dan tidak ada permainan pada urusan minyak goreng curah karena menyebabkan kerugian kepada masyarakat.

SUMBER

Koran Tempo, 11,12,13 April 2022

Kontan, 13 April 2022

Media Indonesia, 11 April 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Rasbin
Venty Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.